



Pengelolaan Potensi Wisata Bukit Pilar oleh Karang Taruna di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Dede Rijki Pauzi^{1*}, Arie Budiawan², Asep Nurdin Rosihan Anwar³

¹⁻³ Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

Universitas galuh, Jl. R. E. Martadinata No. 150, Mekarjaya, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat

Korespondensi penulis: dederijkipauzi@gmail.com ^{1*}

Abstract. *Bukit Pilar, a tourist attraction located in Pangkalan Village, Karang Taruna, Langkaplancar District, Pangandaran Regency, is the subject of research conducted by Karang Taruna of Pangkalan Village with the aim of identifying how the tourism potential of Bukit Pilar is managed. This research uses a descriptive or narrative approach, applying qualitative methods to understand or describe the studied phenomenon. A comprehensive evaluation of all collected data from various sources, such as interviews, observational studies, documents, and conclusions, is the initial step in the data analysis procedures.*

The results of this research provide insights into how Karang Taruna in Pangkalan Village, Langkaplancar District, Pangandaran Regency, manages the tourism potential of Bukit Pilar. Several factors have contributed to the failure in management, including: (1) The absence of a formal body with a clear hierarchy of responsibilities and a lack of experienced human resources in the fundamentals of tourism and public service. (2) Limited promotion of tourism through social media content creation (e.g., Instagram, TikTok) and the lack of tourism package offerings. (3) Lack of collaboration among local government, investors, and academics in developing sustainable tourism. The obstacles identified in each of these indicators include: (1) The village government has not issued an official decree (SK) assigning Karang Taruna the authority to manage the Bukit Pilar tourism site. There is also a lack of skilled human resources capable of managing the tourism object. (2) Social media has not been effectively utilized, and tourism packages have not been developed to promote Bukit Pilar. (3) The management of Bukit Pilar has not yet coordinated with the tourism office and potential investors. In response to these challenges, the managers of Bukit Pilar are approaching the village government to initiate coordination with the tourism office. However, the management of the Bukit Pilar tourism object still faces various obstacles, resulting in the dimensions and indicators of tourism management not being optimally achieved.

Keywords : *Management, Tourism Potential, Bukit Pilar, Karang Taruna of Pangkalan Village*

Abstrak. Bukit Pilar, objek wisata di Desa Pangkalan Karang Taruna, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, dan pengelolannya. Penelitian di bidang ini dilakukan oleh Karang Taruna Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana potensi wisata Bukit Pilar dikelola. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif atau naratif untuk mengetahui atau menggambarkan peristiwa yang diteliti, yaitu metode kualitatif. Evaluasi menyeluruh terhadap semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, studi observasi, dokumen, dan kesimpulan, merupakan langkah pertama dalam berbagai tahapan prosedur analisis data.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana Karang Taruna di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, mengelola potensi wisata Bukit Pilar. Berikut ini adalah beberapa cara yang menyebabkan kegagalan pengelolaan ini: (1) keberadaan badan formal dengan hierarki tanggung jawab yang jelas dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal dasar pariwisata dan pelayanan publik; (2) Promosi wisata melalui media sosial membuat konten instagram, tiktok dan penawaran paket wisata. (3) Kerjasama antara pemerintah, investor dan akademisi dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan. Hambatan dari beberapa indikator tersebut yaitu (1) Pemerintah desa belum mengeluarkan SK kepada Karang Taruna terkait pengelolaan objek wisata bukit pilar. Tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dalam mengelola objek wisata. (2) Pemanfaatan media sosial yang kurang maksimal dan pembuatan paket wisata belum dilakukan dalam melakukan promosi objek wisata bukit pilar. (3) Pengelolaan objek wisata bukit pilar belum melakukan koordinasi dengan dinas pariwisata dan investor Upaya dari beberapa indikator tersebut pengelola objek wisata bukit pilar melakukan pendekatan kepada pemerintah desa untuk melakukan koordinasi dengan dinas pariwisata. Pengelolaan objek wisata bukit pilar masih memiliki beberapa hambatan dalam mengelola objek wisata bukit pilar sehingga dimensi beserta indikator – indikator dalam pengelolaan objek wisata bukit pilar belum optimal.

Kata kunci : Pengelolaan; Potensi Wisata; Bukit Pilar; Karang Taruna Desa Pangkalan

1. LATAR BELAKANG

Wisatawan didefinisikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan perjalanan ke suatu lokasi tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau penelitian tentang keunikan destinasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kepariwisata. Agar tempat wisata tersebut menonjol dan diminati banyak orang, masyarakat, swasta, pemerintah daerah, dan pemerintah desa perlu bekerja sama dalam pengelolaannya. Visi Kabupaten Pangandaran adalah "Pangandaran Juara Menuju Pariwisata Kelas Dunia Berbasis Nilai-Nilai Karakter Bangsa." Dalam visi tersebut, terdapat dua komponen penting dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran periode 2021–2026, yaitu Pariwisata Kelas Dunia dan Nilai-Nilai Karakter Bangsa. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan kepala daerah adalah menjaga keimanan dan kemandirian masyarakat sekaligus menjadikan Pangandaran sebagai Kawasan Pariwisata Dunia yang lebih berdaya saing. Melalui sejumlah program, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berhasil mewujudkan falsafah Pangandaran Juara. Salah satu objek wisata nasional, Bukit Pilar, sangat menarik bagi para pendaki pemula. Bukit Pilar berada di ketinggian 720 meter di atas permukaan laut, tepatnya di perbatasan Desa Pangkalan dan Desa Bojong Kondang. Objek wisata Bukit Pilar saat ini dinaungi oleh Karang Taruna Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Ketiga lembaga tersebut masing-masing ditetapkan sebagai lembaga pada tahun 2003, 2004, dan 2013. Biaya pengelolaan tersebut ditanggung secara sukarela oleh para pemuda anggota lembaga tersebut; Akibatnya, banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan destinasi wisata Bukit Pilar, baik dari segi infrastruktur, fasilitas, maupun potensi. Akibatnya, Desa Karang Taruna Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, dan Kabupaten Pangandaran belum mampu mengelola potensi sumber daya pariwisata di Kecamatan Bukit Pilar secara optimal. Hal ini terlihat dari data jumlah pengunjung tahun 2023 hingga 2025.

TABEL 1.

Data Jumlah Kunjungan Objek Wisata Bukit Pilar Tahun 2023-2025

tahun	Jumlah pengunjung
2023	25
2024	150
2025	30

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bukit Pilar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pada tahun 2025 jumlah wisatawan mengalami penurunan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai di lokasi tersebut, seperti sumber air yang tidak bersih, kurangnya toilet, dan jalan setapak yang tidak terawat menuju lokasi wisata. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi permintaan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Bukit Pilar, maka perlu dilakukan perubahan pengelolaan destinasi wisata, baik bangunan maupun infrastrukturnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah desa dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan industri pariwisata. Agar industri pariwisata dapat mencapai potensinya secara maksimal, diperlukan strategi yang memuat pola pengembangan pariwisata yang terencana atau diantisipasi sebelumnya. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menjadikan pariwisata sebagai kekuatan yang kuat di desa, yang akan memberikan kewenangan kepada Karang Taruna untuk mengembangkan destinasi wisata. Demikian pula metrik berikut menunjukkan bahwa Karang Taruna belum secara efektif mengelola potensi wisata Bukit Pilar di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, menurut temuan penulis :

1. Pengelola potensi wisata Bukit Pilar wajib melengkapi formalitas pemerintahan desa. Terkait pengelolaan objek wisata Bukit Pilar, Dewan Desa wajib menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepada Karang Taruna Desa Pangkalan. Pengelola potensi wisata Bukit Pilar wajib melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk membekali warga dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola objek wisata yang sukses, termasuk kemampuan melakukan studi banding yang relevan.
2. Untuk lebih memasyarakatkan potensi wisata daerah, pengelola potensi wisata Bukit Pilar perlu memanfaatkan media sosial secara efektif untuk promosi dan kerja sama dengan pemerintah desa dan dinas pariwisata.
3. Karang Taruna Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran bertugas mengelola potensi wisata Bukit Pilar.3. Kesesuaian dengan dinas pariwisata sangat penting untuk memanfaatkan potensi wisata Bukit Pilar secara maksimal.

Destinasi wisata yang memungkinkan Salah satu strategi untuk membantu daerah pedesaan adalah pengelolaan potensi pariwisata, yang dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui peningkatan pengunjung. Jadi, gagasan pariwisata berbasis masyarakat dan pemberdayaan harus mendukung upaya ini. Keterlibatan masyarakat di setiap tingkatan dari perencanaan hingga pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sangat penting untuk keberhasilan upaya apa pun. Namun demikian, pihak-pihak tambahan seperti perusahaan swasta dan pemerintah daerah juga harus mendukung inisiatif ini. Kelompok-kelompok ini memiliki aset

yang lebih besar dalam hal pendanaan, kolaborasi, data, keahlian, dan teknologi. Akibatnya, potensi desa hanya dapat dikembangkan melalui upaya Pemerintah Desa. Merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk menyusun strategi untuk meningkatkan potensi pariwisata dengan meningkatkan kemampuan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi lokal, masyarakat, dan pemerintah desa itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ". Pengelolaan Potensi Wisata Bukit Pilar oleh Karang Taruna di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran".

2. KAJIAN TEORITIS

Peneliti menemukan masalah dalam pengelolaan potensi wisata Bukit Pilar dalam penelitian ini. Menyusun tujuan dan kebijakan bagi suatu organisasi, atau mengawasi seberapa baik rencana tersebut berjalan, merupakan dua fokus utama manajemen (Poerwadarminta,2008). Sedangkan menurut (syamsyi 2008) Namun, manajemen merupakan proses, strategi, dan tindakan manajerial yang membantu merumuskan kebijakan dan mencapai tujuan dengan mengoordinasikan upaya orang lain (Suartini, Suhartawan, and Triawati 2022).

Berdasarkan uraian menurut para ahli di atas manajemen merupakan reaksi berantai yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, dengan tujuan akhir memanfaatkan sumber daya alam kawasan wisata Bukit Pilar seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan utama dari tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan wisata di tingkat dasar. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa undang-undang ini mencakup tanggung jawab manajemen pariwisata untuk melindungi lingkungan dan sumber dayanya dari pencemaran dan kerusakan. Rencana tersebut akan dijalankan. Fokus pada empat area ini penting untuk pembangunan berbasis sosial;

1. Aksesibilitas dengan kenyamanan dan kondisi sebagai tema utama.
2. Perlindungan lingkungan merupakan tema utama dalam siklus jasa dan bisnis.
3. Kemajuan ekonomi menjadi isu utama kinerja bisnis dan siklus bisnis.
4. Pengelolaan berkelanjutan atas topik, tujuan dan metode inti.

Empat pilar yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengelolaan pariwisata.

Selanjutnya Menurut Cox 1985 dalam jurnal (Erlangga Brahmanto 2013) pengelolaan pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- a. Pengetahuan dan identitas lokal yang berakar pada sejarah dan alam harus menjadi dasar pengembangan dan peningkatan pariwisata.

- b. Sumber daya yang mendukung destinasi wisata harus dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan.
- c. Meningkatkan jumlah tempat wisata yang menonjolkan adat istiadat dan sejarah daerah.
- d. Layanan pariwisata yang menonjolkan budaya dan lingkungan alam khas daerah.
- e. Memiliki kekuatan untuk mengendalikan atau menghentikan suatu kegiatan, sekaligus memberikan dukungan dan legitimasi terhadap pengembangan dan pertumbuhannya dalam industri pariwisata, jika kegiatan tersebut benar-benar menghasilkan hasil positif. Di sisi lain, nilai moneter Komunitas dapat meningkat jika hal ini terjadi.

Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan atau manajemen menurut G.R. Terry, (1972) dalam buku Hasibuan p.3 menjelaskan fungsi manajemen yang terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling*,

Potensi wisata bukit pilar perlu dikelola dengan optimal agar potensi wisata tersebut berkelanjutan. Karang taruna di desa pangkalan melalui NGAPALA perlu mengelola potensi wisata bukit pilar dalam terus menopong perkembangan dan pertumbuhan wisata ataupun khususnya Masyarakat dalam membangun pariwisata di daerah. Dengan adanya objek wisata gunung pilar diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, memberikan peluang kerja, dan menjaga kelestarian alam di desa pangkalan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka karang taruna perlu menerapkan prinsip – prinsip manajemen untuk mengelola potensi wisata bukit pilar agar berjalan secara optimal sehingga potensi wisata bukit pilar menjadi wisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi Masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan metodologi kualitatif. Moleong (2014:2) setuju, yaitu mendeskripsikan isu di lapangan berdasarkan data wawancara dan observasi. Durasi penelitian adalah lima bulan. Informasi dikumpulkan dengan meninjau literatur yang relevan, melakukan studi lapangan (termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebanyak 5 orang dipilih sebagai informan. Teknik untuk memproses, menganalisis, dan menafsirkan data yang menggunakan metode deskriptif dikenal sebagai analisis data. Triangulasi sumber data merupakan hasil akhir dari metode ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengelolaan potensi wisata bukit pilar oleh karang taruna di desa pangkalan kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

Adanya organisasi atau kelompok kerja yang resmi dan memiliki struktur kerja yang jelas.

Pembentukan kelompok kerja resmi yang mengelola objek wisata bukit pilar itu belum dibentuk baru membentuk organisasi sementara yang mengelola objek wisata bukit pilar.

Menurut Wijaya dan Rifa'I (2016), pengorganisasian adalah tentang membangun hubungan yang kuat di antara para pekerja sehingga mereka semua dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hambatan membentuk organisasi resmi dalam mengelola bukit pilar yaitu pemerintah desa belum mengeluarkan SK resmi kepada karang taruna dalam mengelola objek wisata bukit pilar. Selanjutnya Upaya dalam membentuk organisasi resmi atau kelompok kerja dalam mengelola objek wisata bukit pilar, kelompok NGAPALA melakukan pendekatan kepada pemrintah desa agar mengeluarkan SK resmi dalam mengelola wisata bukit pilar kepada karang taruna.

Destination Management Organizations (DMOs) bertanggung jawab atas tempat-tempat wisata di sektor pariwisata; tujuan mereka adalah membuat tempat-tempat tersebut lebih baik dan lebih populer di kalangan wisatawan. Meskipun teori tersebut memperkirakan bahwa tidak ada organisasi resmi atau kelompok khusus seperti itu, uraian sebelumnya membuatnya tampak seolah-olah ada sekelompok orang yang tugasnya adalah mengawasi potensi objek wisata Bukit Pilar.

Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pelatihan, dan pengetahuan dasar pariwisata dan pelayanan publik

Pengelolaan destinasi wisata seperti Bukit Pilar membutuhkan waktu yang lama, sehingga penelitian ini menemukan bahwa sumber daya manusia dengan keterampilan khusus menjadi tantangan bagi Desa Pangkalan dalam mengelola destinasi wisata Bukit Pilar. Selain itu, pariwisata masih merupakan bidang studi yang relatif baru di Desa Pangkalan, sehingga belum jelas bagaimana masa depannya. Salah satu tantangan dalam mengelola destinasi wisata Bukit Pilar adalah minimnya sumber daya manusia dengan keterampilan yang dibutuhkan.

Agar industri pariwisata dapat berkembang, sumber daya manusia sangatlah penting. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam industri pariwisata karena bagi sebagian besar pelaku usaha yang bergerak di dalamnya, manusia merupakan aset yang paling berharga. Tahun itu (2018)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat Desa Pangkalan dan Karang Taruna sebisa mungkin mengandalkan objek wisata Bukit Pilar dan belajar membagi waktu dengan bijak agar dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola

objek wisata tersebut. Bukit Pilar, objek wisata populer di Desa Pangkalan Karang Taruna, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk sektor pariwisata dan jasa.

Promosi Wisata Melalui Media Sosial Membuat Konten Instagram, Tiktok Dan Penawaran Paket Wisata.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola potensi wisata Bukit Pilar di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran belum melakukan promosi usahanya di media sosial. Selain itu, belum ada kantor pariwisata atau lembaga lain di Kabupaten Pangandaran yang menyelenggarakan wisata yang dikelola oleh pengelola potensi wisata Bukit Pilar. Kendala dalam penyelesaian masalah adalah belum adanya keterlibatan dari kantor pariwisata dan pemanfaatan media sosial.

Pemasar menggunakan promosi sebagai alat untuk memberi pencerahan kepada pembeli, menarik minat mereka, dan memperjelas konsep produk. Periklanan sangat penting dalam penjualan barang wisata dikarenakan iklan memediasi arus informasi tentang produk dari Arini dan Lasso (2024), iklan memiliki peran perantara yang penting.

Hasil penelitian teoritis dan empiris menunjukkan bahwa pengelola sumber daya wisata Bukit Pilar tidak memiliki strategi promosi regional yang memanfaatkan media sosial untuk menarik pengunjung ke objek wisata unggulan di daerah tersebut.

Kerjasama Antara Pemerintah, Investor Dan Akademisi Dalam Pengembangan Wisata Yang Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Dinas Pariwisata maupun investor belum bekerja sama dengan pengelola potensi wisata Bukit Pilar di Desa Pangkalan Karang Taruna, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Saat ini belum ada sumber dana untuk membangun prasarana dan sarana di destinasi wisata Bukit Pilar, sehingga menjadi kendala dalam pengelolaan potensi wisata Bukit Pilar.

Menurut Wijaya dan Rifa'I (2016), pengawasan adalah mengawasi segala sesuatu yang terjadi di tempat kerja untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Dengan pengawasan yang tepat, kesalahan di berbagai bidang seharusnya tidak akan menghambat kemajuan menuju tujuan.

Penelitian dan teori yang dikemukakan selama ini belum membuahkan hasil yang nyata, hal ini disebabkan Karang Taruna yang bertugas mengelola potensi wisata Bukit Pilar di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran belum bekerja sama

dengan Dinas Pariwisata maupun bermitra dengan investor. Akibatnya, penilaian terhadap prasarana yang ada dan penyediaan sarana yang diperlukan menjadi terhambat.

5. KESIMPULAN

Penelitian tentang pengelolaan potensi wisata bukit pilar oleh karang taruna di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Karang taruna di Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan belum memiliki prinsip pengelolaan maupun sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola suatu destinasi wisata secara efektif. Selain itu, karang taruna di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran mengelola potensi wisata tersebut, namun Pemerintah Desa Pangkalan yang belum melakukan koordinasi yang efektif dengan Dinas Pariwisata tidak mengetahui hal tersebut. Penelitian tentang pengelolaan potensi wisata bukit pilar oleh karang taruna di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran juga menemukan kekurangan yang sama, yakni dari segi sarana dan prasarana yang memadai. Dengan demikian, upaya karang taruna dalam mengelola potensi wisata bukit pilar di Desa Pangkalan, Kecamatan Langkaplancar, dan Kabupaten Pangandaran selama ini belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Arini, L. (2024). Pemanfaatan promosi media sosial Instagram untuk keberlanjutan Desa Budaya Kertalangu, Bali. *Jurnal Kajian Pariwisata*.
- Candra Wijaya, D., & Muhammad Rifa'i. (2016). *Dasar-dasar manajemen: Mengoptimalkan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien*. Perdana.
- Pajriah. (2018). Peran sumber daya manusia dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ciamis.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata. Provinsi Jawa Barat.
- Prihantoro, A., & Hidayat, F. (2019). Melakukan penelitian tindakan kelas. *Ulummudin*, 9(21), 48–60. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/index
- Raharja, R., & Khutomah. (2023). Pengembangan produk wisata dan perancangan digital destination branding wisata desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Romli, L. (2008). Masalah reformasi birokrasi. *E-Journal BKN*, 2(2), 1–8. <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/149>
- Suartini, N. K., Suhartawan, I. G., & Triawati, K. (2022). Manajemen pengelolaan objek wisata Taipa Beach. *Jurnal Pariwisata Parama: Panorama, Recreation, Accommodation, Merchandise, Accessibility*, 3(1), 12–21. <https://doi.org/10.36417/jpp.v3i1.456>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wahyudiati, D. (2018). Pengaruh aspek keuangan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Kasongan. *Profita*. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13761/13264>